

## IT & ELEKTRONIK

## HP, GADGET, DIGITAL, STUDIO FOTO, ELEKTRONIK, PERALATAN & PERABOTAN KANTOR

**SPECIAL**  
ULANG TAHUN  
COMPUTA KE 38

**38**  
Tahun Berdiri

**COMPUTA ANNIVERSARY SALE**  
hanya di :  
[www.computa.co.id](http://www.computa.co.id)

**DISKON** HINGGA  
**SPECIAL 38%**

LAPTOP - KOMPUTER - PRINTER  
PROYEKTOR - HDD EKSTERNAL - AKSESORIS

**Kedaulatan Rakyat**  
**EPAPER**  
[www.kr.co.id](http://www.kr.co.id)

Berlangganan  
Scan Barcode

Mari kita Kedaulatan Rakyat  
juga hadir dalam format koran digital  
atau electronic paper (epaper).  
Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat  
dapat Anda nikmati melalui genggaman  
tangan Anda. Sekarang.

**KR RADIO**  
107.2 FM

Media Informasi & Hiburan

**High Light KR Radio**

- SewarnaA
- Jogja KR
- Bening Hati
- Info Musik
- Beades Maria
- Kaweruh Basa Jawa
- KR Diskografi
- Drama Radio
- Kaerindie
- Gardoe Jaga
- Kopi Pagi

Pemasaran :  
Jl. Margo Utomo / P. Mangkubumi No. 40 - 46  
Jogjakarta Telp./Fax. : 0274 550 891

Studio :  
Jl. Veteran No. 16 Wates Kulon Progo  
D.I.Yogyakarta

**krjogja.com**  
Lebih Mengeri Jogja

dari  
**JOGJA**  
untuk  
**DUNIA**

Redaksi:  
Jl. P. Mangkubumi No. 40-46  
Yogyakarta 55232  
redaksi@krjogja.com  
Telp. : +62-274 315 5542

Kantor:  
Kedaulatan Rakyat  
Jl. Veteran No. 16 Wates  
Kulon Progo  
D.I.Yogyakarta  
Telp. : +62-274 550 892  
Fax : +62-274 550 890

[www.krjogja.com](http://www.krjogja.com)

**Kedaulatan Rakyat**  
**POJOK DIGITAL**  
**IT & ELEKTRONIK**

- HP
- KOMPUTER
- GADGET
- DIGITAL
- ELEKTRONIK
- KAMERA / STUDIO FOTO
- PERALATAN & PERABOTAN KANTOR MODERN

**Setiap Kamis**

Hanya di :  
**Kedaulatan Rakyat**

## TERKAIT WAHANA WISATA BELUM BERIZIN DPRD Panggil 9 OPD untuk Diklarifikasi

**WONOSARI (KR)** - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul akhirnya memanggil 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengklarifikasi dan membahas adanya pengoperasian destinasi wisata baru *HeHa Ocean View* di Pantai Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul (KR-Selasa 9/2).

Klarifikasi dipimpin Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih SE dengan mendengarkan laporan masing-masing pimpinan OPD terkait, sebagai upaya mencari tahu sumber persoalan yang kemudian menimbulkan masalah dibalik usaha itu berlangsung di Gedung DPRD Gunungkidul Rabu (10/2).

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, terungkap bahwa destinasi wisata tersebut belum melengkapi sejumlah izin dan untuk kepatuhan tentang protokol kesehatan (prokes) juga masih dilanggar dan menimbulkan potensi terjadinya kerumunan ditengah pandemi Covid-19.

Sebagaimana dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Gunungkidul Agus Priyanto MSi tim dari pengelola destinasi wisata tersebut memang sudah memproses tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), tetapi setelah beberapa tahap demi tahapan tidak dilanjutkan lagi dan terkesan terhenti. Untuk AMDAL ini tahapan yang sudah dilewati adalah penapisan (identifikasi) dan sudah ada jawaban dari DLH terkait penapisan. "Seharusnya tahap berikut yang harus dilakukan yakni diskusi mengenai jawaban tersebut, tetapi saat ini justru tidak dilanjutkan," ujarnya.

Sesuai jawaban tiap OPD, ada beberapa izin yang ternyata belum dilengkapi mulai dari Izin Usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

hingga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Terkait dengan hal tersebut Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih SE meminta Bagian Hukum Setda Kabupaten Gunungkidul melakukan telaaah hukum terkait dengan regulasi pembangunan destinasi wisata tersebut. "Kami minta bagian hukum Pemkab Gunungkidul melakukan telaaah terhadap persoalan ini," ucapnya.

Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti secara tegas meminta investor bersangkutan mengikuti prosedur perizinan usaha yang berlaku. Harus melengkapi seluruh izin terlebih dahulu baru boleh beroperasi. Hal ini juga berlaku bagi para investor dan pelaku usaha lain di Gunungkidul. Merujuk pemaparan perwakilan tiap OPD, Endah menyimpulkan pengelola wisata itu belum melengkapi sejumlah izin dan Pemkab Gunungkidul berpotensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). **(Bmp/Ded)-f**

## UPZ MAN 1 GUNUNGKIDUL Bagi Sembako Hingga Pemberdayaan

**WONOSARI (KR)** - Unit Pengumpul Zakat (UPZ) MAN 1 Gunungkidul mendistribusikan zakat profesi dengan menerapkan protokol kesehatan. Setiap penerima bantuan yang datang diwajibkan memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Bahkan distribusi zakat yang dikemas dalam bentuk sembako, usaha produktif, alat usaha dan pemberdayaan dilakukan secara bergantian.

"Mudah-mudahan zakat yang didistribusikan ini memberikan manfaat bagi penerima," kata Kepala MAN 1 Gunungkidul Kholis Muhajir SAg MSi di dampingi sekretaris UPZ Hermawan Prono Spd MPd, Selasa (9/2).

Dana yang ditasarufkan sejumlah Rp 52.375.000 dengan rincian 178 paket sembako, usaha produktif



KR-Dedy EV

**Kholis Muhajir MSi menyerahkan sembako.**

berupa pemberian usaha gerobak 4 unit, satu paket usaha budidaya jamur, bantuan 2 masjid, 5 pondok pesantren dan asrama siswa. Diungkapkan, penyaluran ini juga bertepatan dengan 1 tahun usia UPZ. Melalui bantuan alat usaha maupun pemberdayaan diharapkan akan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

"MAN 1 Gunungkidul juga membagikan masker bagi penerima bantuan. Serta mendukung Instruksi Kementerian Agama dalam protokol kesehatan. Mulai memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi," imbuhnya. **(Ded)-f**

## TANPA SALURAN DI PESANGGRAHAN Rumah Warga dan Sekolah Terendam Luapan Banjir



KR-Agussutata

**Halaman SDN Pesanggrahan di Kalurahan Bendungan yang terendam luapan banjir.**

**WATES (KR)** - Puluhan rumah warga termasuk gedung sekolah di wilayah Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates terendam luapan banjir yang disebabkan turun hujan lebat mengguyur wilayah Kulonprogo, Rabu (10/2) dini hari.

Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima di Posko Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kulonprogo, menyebutkan terdapat sekitar 29 kejadian banjir dan tanah longsor. Salah satu kejadian tanah longsor di Gunung Kukusan, Kalurahan Kalirejo menutup akses jalan kabupaten.

Longsor sudah berhasil dibersihkan dan kendaraan sudah dapat melewati jalan tersebut. Kemudian banjir secara acak melanda di wilayah Kapanewon Temon, Wates, Pan-

jatan dan Kapanewon Galur. Genangan air yang merendam pemukiman, sekolah dan areal pertanian surut setelah turun hujan reda.

"Banjir datang tengah malam, Rabu (10/2) dinihari sekitar pukul 01.00. Air menggenangi pekarangan dan rumah warga. Air meluap disebabkan tidak ada saluran drainase sehingga setiap musim hujan sering kebanjiran," ujar Ponijo, warga RT 13, Pesanggrahan Lor.

Luapan banjir di Kalurahan Bendungan merendam rumah warga, gedung SD, pekarangan dan perumahan di Pesanggrahan Lor dan Pesanggrahan Kidul. Genangan air mencapai sekitar 50 centimeter atau setinggi lutut orang dewasa.

Kepala Bagian Kesra atau Ulu-Ulu Kalurahan Bendungan, Yuda Subrata

mengungkapkan banjir yang meluap merendam sekitar 20 rumah warga dua RT di Pesanggrahan Lor dan satu RT di Pesanggrahan Kidul. Banjir disebabkan tidak ada saluran drainase pembuangan air wilayah tersebut.

Kepala SDN Pesanggrahan Maria Magdalina Sulami bersama Ketua Komite SDN Pesanggrahan, Heri Rohadi mengungkapkan luapan banjir menggenangi delapan ruang sekolah. Ketinggian air di ruangan mencapai sekitar 30 cm dan di halaman sekolah sekitar 60 cm.

Menurutnya, setiap musim penghujan sekolah menjadi langganan luapan banjir. Air dari berbagai penjuru masuk ke lingkungan sekolah dan pemukiman penduduk. Luapan banjir disebabkan tidak ada drainase pembuangan air. **(Ras)-f**

## LUAS TANAMAN NASIONAL 500 RIBU HEKTARE Kembalikan Kejayaan Kedelai



KR-Endar Widodo

**Dr Amirudin Pohan (tengah) mengawali gerakan tanam kedelai di Playen.**

**WONOSARI (KR)** - Secara nasional pemerintah terus berusaha dapat mencukupi kebutuhan kedelai. Presiden meminta untuk dilakukan gerakan tanam (gertam) dan perluasan areal agar tidak terjadi kelangkaan dalam pencucupan kebutuhan secara nasional. Sasaran luas tanam tahun 2021 500.000 hektare. Tersebar di seluruh wilayah yang potensi lahannya memenuhi syarat untuk pengembangan tanam kedelai. Termasuk di Gunungkidul yang pernah menjadi salah satu penghasil kedelai di DIY menjadi sasaran gerakan nasional.

"Pemerintah kabupaten secara bertahap agar terus meningkatkan luas tanam untuk mendukung peningkatan produksi nasional," kata Direktur Aneka Kacang dan Umbi (AKU) Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Dr Amirudin Pohan dalam pencaangan gerakan tanam di Pedukuhan Galih,

Kalurahan Plembutan, Kapanewon Playen, Rabu (10/2).  
Sebagaimana dilaporkan Ketua Kelompok Tani (Poktan) Sido Rukun II Plembutan Wakiman, penanaman kedelai pada musim tanam (MT) II ini secara tumpangsari, penanaman disisipkan disela tanaman jagung yang sudah hampir panen. Harapannya ketika jagung dipanen tanaman kedelai tumbuh lebih cepat dan subur. Pengembangan kedelai di Plembutan mendapatkan bantuan benih dan pupuk untuk areal 55 hektare.  
"Khusus untuk poktan Sido Rukun II seluas 20 hektare, dengan rincian 15 hektare di tanam di hutan kemasyarakatan, 5 hektare ditanam di lahan pekarangan petani dan lainnya tersebar seluruh Kalurahan Plembutan," tambahnya. **(Ewi)-f**

## BUPATI INSTRUKSIKAN Pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro

**WATES (KR)** - Sejumlah Pemerintah Kalurahan di Kulonprogo telah menindaklanjuti instruksi dan arahan Bupati Drs H Sutedjo terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Salah satunya Pemerintah Kalurahan Triharjo telah mengaktifkan kembali Posko Covid-19 Kalurahan.

"Ya Posko Covid-19 Kalurahan Triharjo telah kami aktifkan kembali. Pak Dandim 0731/ Kulonprogo Letkol Inf Yefta Sangkakala bersama Danramil 01/ Wates Kapten Inf Wiyono dan Babinsa Sertu Wahyudi sudah melakukan pengecekan di balai kalurahan," kata Jagabaya Kalurahan Triharjo Bambang Handaya, Rabu (10/2).



KR-Asrul Sani

**Dandim 0731/Kulonprogo Letkol Inf Yefta Sangkakala dan jajarannya mengecek Posko Covid-19 Kalurahan Triharjo.**

Pengaktifkan kembali posko tersebut sebagai tindak lanjut instruksi bupati tentang pelaksanaan PPKM mikro kepada kapanewon, kalurahan dan pedukuhan se-Kulonprogo yang disampaikan secara daring, Selasa (9/2). Saat daring Bupati Sutedjo

minta informasi seputar PPKM berbasis mikro segera sampai ke bawah dan ditindaklanjuti dalam kurun satu dua hari. Seluruh posko memastikan dan memantau kalurahan di wilayahnya untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Lurah juga diminta

mengkondisikan kebijakan ini terlaksana sampai tingkat RT.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kulonprogo Fajar Gega mengatakan, saat ini memang ada sejumlah pemerintah kalurahan sudah siap melaksanakan hal tersebut, tapi kebanyakan baru persiapan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (PMDDAL-DUKKB) Kulonprogo Sudarmanto SIP MSi instruksi bupati tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Instruksi Gubernur DIY nomor 5/IN-STR/2021 tentang Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro. **(Rul)-f**

## PERDA NOMOR 9 TAHUN 2015 DIAJUKAN REVIEW Tak Relevan dengan Kepariwisata

**PENGASIH (KR)**-Review Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda) Tahun 2015-2025 diajukan Pemkab Kulonprogo ke DPRD, karena sudah tidak relevan dengan dinamika perkembangan kepariwisataan dan regulasi, serta arah kebijakan pembangunan di bidang pariwisata. Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ripparda 2015-2025 ini perlu ditinjau untuk disesuaikan.

"Sudah tidak relevan seiring dengan perkembangan infrastruktur Bandara Internasional Yogyakarta (BIY), jalur bebandar dengan menghubungkan bandara dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, serta penyesuaian terhadap regulasi, serta kebijakan pembangunan kepariwisataan," kata Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo saat rapat paripurna (rapur) penyampaian raporda, Senin (8/2) sore.

Adanya dinamika perkembangan kepariwisataan, papir Sutedjo, berpengaruh terhadap visi pembangunan kepariwis-

taan daerah yaitu terwujudnya Kulonprogo sebagai destinasi pariwisata kolaboratif yang berbasis budaya, terkemuka, berkelas dunia, berdaya saing, mandiri, berkelanjutan, dan mampu mendorong pembangunan daerah, serta menyejahterakan masyarakat.

Perubahan juga terjadi dalam arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) dan pengembangan kawasan pembangunan pariwisata daerah (KPPD) yang meliputi, KSPD Suroloyo dan sekitarnya, KSPD Kiskendo dan sekitarnya, KSPD YIA dan sekitarnya, KSPD pantai selatan dan KPPD Segaleh.

Kulonprogo, dikatakan Ketua Fraksi PKS DPRD Kulonprogo Hamam Cahyadi ST, merupakan salah satu daerah dengan beragam potensi pariwisata, Baik wisata alam, wisata kuliner, maupun wisata budaya serta letak geografis yang membentang dari selatan ke utara sehingga menghasilkan kolaborasi keindahan alam yang khas dari pantai hingga pegunungan. **(Wid)-f**